

KAUM MUDA DAN AKTIVISME POLITIK DARING DI INDONESIA

Lidwina Mutia Sadasri¹

¹Departemen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM

lidwina.mutia@ugm.ac.id

Abstrak

Relasi media dan demokrasi makin tampak di era internet melalui beragam konten yang dapat diunggah langsung oleh pengguna. Dalam konteks pengguna, Indonesia sebagai negara padat penduduk mengalami peningkatan signifikan hingga muncul aktivisme daring. Jika ditilik dari payung besar aktivisme daring bernama Digital Nation Movement (Dinamo), sampai pada Januari 2019 ini, tidak semua komunitas yang berada di bawahnya mengalami perkembangan. Dari pengamatan berbasis daring, Dinamo yang menjadi payung pun mengalami kemandegan. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam lanskap aktivisme daring di Indonesia. Salah satu gerakan yang masih aktif hingga saat ini dengan basis anak muda adalah Pamflet, organisasi nirlaba yang memiliki fokus pada pergerakan anak muda dengan mendorong munculnya inisiatif bagi perubahan di bidang sosial dan budaya. Pamflet menjadi salah satu aktivisme daring yang aktif dan terafiliasi dengan Dinamo dengan membawa isu Hak Asasi Manusia. Padahal, posisi kaum muda dalam aktivisme mengalami posisi yang cukup rentan terlebih asumsi apatisisme akan isu politik. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan gerakan kaum muda melalui metode studi kasus yang bersifat kualitatif. Simpulan dalam tulisan ini menunjukkan praktik aktivisme politik daring dan luring yang ditargetkan pada kaum muda mengoptimalkan media sosial daring dan strategi konten yang serupa dengan taktik *content provider* favorit anak muda dengan video 1 menit.

Kata Kunci: aktivisme daring, kaum muda, pamflet.

PENDAHULUAN

Internet sebagai bagian dari media baru memberi beragam peluang bagi penggunanya. Dalam konteks Indonesia, potensi positif dan negatif sama-sama termanifestasikan. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh menteri Kominfo, Rudiantara (2019) bahwa terdapat beragam perkembangan digital mulai dari perdagangan sampai penggalangan dana, namun muncul juga paling tidak enam kategori tantangan penggunaan internet untuk tujuan negatif, yakni penyebaran berita bohong, penyebaran konten pornografi, penipuan secara *online*, perundungan siber, konten terkait perjudian, serta radikalisme/ekstrimisme digital.

Hal yang terakhir disebutkan di atas dapat dikategorikan dalam konteks politik.

Politik di Indonesia pun menjadi makin masif terfasilitasi oleh media baru. Secara mendasar, media komunikasi memang digunakan oleh aktor politik untuk mengomunikasikan pesannya pada audiens yang diinginkan. Saat ini, teknologi membantu dengan sarana *mobile* yang lebih sering mengubah perilaku *protesters*, membuat makin mudah berkomunikasi, mengelola, berbagi informasi, mengubah lokasi pertemuan (Ayres, 1999). Kegiatan daring ini mengubah protes jalanan dan protes daring, sesuatu yang disebut *cyberactivism* (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2014, h. 365). *Cyberactivism* telah menjadi kekuatan politis signifikan pada sisi kecepatan yang hampir tidak mungkin untuk dipahami (Price, 2000, hal. 30).

Howard (2011, h. 145) mendefinisikan *cyberactivism* sebagai tindakan menggunakan internet untuk mengembangkan basis politik yang sulit dikembangkan secara *offline*, tujuan aktivisme semacam itu seringkali untuk menciptakan artefak digital secara intelektual dan emosional yang persuasif yang menceritakan ketidakadilan, interpretasi sejarah dan advokasi (Khamis & Vaughn, 2011, hal. 5). *Cyberactivism* dibedakan dari mobilisasi karena mobilisasi berfokus pada perencanaan, eksekusi, dan fasilitasi tindakan. Namun keduanya berelasi, karena *cyberactivism* dapat membantu mendorong dan mempromosikan keterikatan sipil, yang pada gilirannya melahirkan beragam bentuk mobilisasi.

Sejumlah ekspresi *cyberactivism* mungkin diinterpretasikan sebagai misi partisipasi dan praktik demokrasi langsung. *Cyberactivism* memiliki potensi terkait mendukung pemberdayaan individu dan kolektif dan partisipasi. Selain itu dapat dilihat sebagai manifestasi aksi akar rumput dari tekanan sosial yang mendorong sampai batasan demokrasi liberal dan mempertanyakan hubungan antar individual dan negara (Milan, 2012, hal. 13). *Cyberactivism* merujuk pada perubahan dalam nilai sosial yang memiliki potensi untuk bicara jujur pada kuasa, kontribusinya memiliki visi membebaskan.

Istilah lain yang merelasikan media dan masyarakat selain aktivisme daring dan luring adalah gerakan sosial. Gerakan sosial menjadi salah satu manifestasi relasi media dan aktor. Gerakan sosial dimaknai sebagai tindakan kolektif yang bertujuan mengubah nilai dan kepentingan yang terinstitusionalisasi dalam masyarakat (Juris, 2004; Couldry, & Curran, 2003 dalam Castells, 2007, hal. 249). Gerakan sosial dinyatakan berpikiran lokal, berakar pada masyarakat, dan bertindak global, melawan kuasa dimana pemegang kuasa dalam jejaring global kuasa berada dalam ruang komunikasi. Media baru sendiri memiliki kesempatan untuk

menjadi sarana globalisasi isu yang dibawa oleh gerakan sosial.

Terdapat beragam contoh pemanfaatan media baru dalam gerakan sosial. Aktivisme warga Cina menjadi salah satunya dan menandai sejumlah perbedaan signifikan dari gerakan sosial di masa lalu. Melalui media *online*, aktivisme terjadi lebih sering, melibatkan isu yang beragam, memiliki basis sosial yang lebih luas, bisa terjadi secara spontan maupun dikelola, meraih tujuan yang sederhana maupun besar, mengadopsi *time-honored*, konfrontasional serta inovatif, bentuk yang *nondisruptive* (Yang, 2013 hal 42).

Dalam konteks Indonesia, internet mencapai tempat teratas dalam proses jatuhnya Soeharto (Sen & Hill, 2000, hal. 227). Dalam dua tahun terakhir pemerintahan Soeharto, internet digunakan secara ekstensif oleh kaum oposisi kelas menengah perkotaan untuk menghindari sensor media siaran yang ditetapkan rezim Orba. Pada konteks Indonesia, relasi kampanye sosial dan advokasi dengan internet salah satunya ditunjukkan dengan hasil survei daring oleh Yayasan Satu Dunia di tahun 2011 (Ambardi et. al., 2014, hal. 35). Sejumlah responden termasuk organisasi masyarakat sipil menyatakan bahwa seluruh responden tersebut menggunakan internet dalam bekerja dengan alasan untuk berkomunikasi dengan aktivis, berbagi informasi dan memperluas jejaring.

Aktivisme daring sebagai suatu fenomena dapat dipahami dan dipelajari dengan titik tekan relasi antara elemen di dalamnya, baik sistem, aktor, maupun elemen kuasa. Bentuk gerakan sosial atau pemberdayaan di satu sisi dapat dilihat sebagai bentuk praktik kuasa dalam jejaring, terlebih interaksi yang menyebar dan bertingkat seperti pada aktivisme dunia *cyber*.

Jika dipetakan melalui konsep *power*, yang terjadi di Indonesia ketika penggulingan Soeharto, dapat dikategorikan sebagai *counter-power*. *Counter-power* dapat dipahami sebagai kapasitas aktor sosial untuk menantang dan

mengubah relasi kuasa dalam masyarakat. Oleh Castells (2007, hal. 248) dinyatakan bahwa di seluruh masyarakat, *counter-power* eksis di bawah beragam bentuk dengan intensitas yang beragam, sebagai satu dari beberapa sifat hukum masyarakat, di sepanjang sejarah, dimana ada dominasi maka terdapat resistansi, baik politis, kultural, ekonomi, psikologis, dan lain sebagainya (Castells, 2007, h. 248). Sejalan dengan perkembangan krisis legitimasi politik, berkembang pula gerakan sosial, datang dalam beragam bentuk dan beragam sistem kontras atas nilai dan keyakinan, berlawanan dengan apa yang seringkali didefinisikan sebagai kapitalisme global.

Counter-power juga dimungkinkan melalui karakteristik teknologi media baru dalam mengubah standar *gatekeeping* karena konten interaktif yang diproduksi oleh audiens itu sendiri. Relasi ini memungkinkan informasi politik yang berkualitas karena dikelola oleh standar yang demokratis dan tidak bias elit. Meski demikian, politik media baru dapat menciptakan trik politik baru, salah satunya dengan menggunakan “Google bombing” (Castells, 2007, hal. 256). Di luar kecenderungan praktik kuasa dalam konteks komunikasi politik yang memiliki arah *top-down* atau *bottom-up*, kuasa selalu ada dalam jejaring sosial secara konkret (Stammers, 1999, hal. 983). Untuk itu, kuasa perlu dilihat sebagai yang dipeluk, berkembang, dan dipraktikkan oleh individual atau aktor sosial kolektif dan mengenali manifestasi kuasa secara struktural melalui pola sistem sosial. Wacana sebagai salah satu manifestasi kuasa yang dapat diidentifikasi, konstruksi dan penggunaan haknya oleh gerakan sosial telah memainkan peran penting dalam relasi dan struktur kuasa, baik dalam lokasi kuasa dan dalam kerangka cara kuasa ada dalam relasi sosial (Stammers, 1999, h. 987).

Lebih jauh terkait penelitian tentang penggunaan media sosial untuk *cyberactivism* mendukung gagasan bahwa teknologi internet

memberi kesempatan bagi *protester* untuk mengelola dalam cara yang terdesentralisasi tanpa otoritas sentral. Bentuk pengelolaan semacam ini menciptakan bentuk tindakan kolektif yang fleksibel dan secara radikal mengubah cara politik akar rumput beroperasi (Gonzales-Bailon, 2013 dalam Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2014, hal. 368). Media alternatif dan media berbasis komunitas dapat berperan dalam mendemokratisasikan komunikasi *top-down* dan memberi kesempatan komunikasi yang lebih horizontal dan resiprokal bagi warga (Clark, 2012, hal. 26).

Bahkan Castells (2007, hal. 250) menyatakan bahwa bagi gerakan sosial baru, internet memberikan *platform* esensial untuk debat, sarana untuk bertindak atas pikiran manusia, dan melayani sebagai senjata politik yang paling berpotensi. Secara praktis, akses internet melalui *mobile* bersifat krusial bagi aktivis di lapangan. Warga juga meraih keuntungan dari media baru untuk pencapaian sosial politik atas mobilisasi dukungan politik dengan menekan pemerintah untuk mendengarkan permintaan politik (Ambardi et., al., 2014, hal. 40). Partisipasi dalam politik telah difasilitasi melalui penggunaan TIK. Tindakan politik akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih universal dengan teknologi yang berkembang. TIK menurunkan biaya dan hambatan mengelola tindakan kolektif secara signifikan (Aelst & Walgrave, 2002, hal. 466).

Dengan keuntungan yang dibawa oleh TIK, senyatanya terdapat tantangan dalam mengelola relasi TIK dengan gerakan sosial. Evgeny Morozov (2011) menyatakan bahwa jika sarana jejaring sosial tidak digunakan dengan baik maka dapat membantu rezim otoritarian untuk mempertahankan kuasa untuk mampu memonitor dan bahkan mematikan jejaring. Dalam kasus Green Movement, pemerintah mempublikasikan foto dengan melingkari wajah aktivis dan digunakan untuk mengidentifikasi dan menahan paling tidak 40

orang (Morozov, 2011, dalam Moghanizadeh, 2013 hal 7).

Selain tantangan di atas, problem terkait relasi antara *offline* dan *online* juga menjadi *challenge* tersendiri. Ruang daring diciptakan oleh media sosial dan berguna bagi interaksi dan wacana warga, perubahan sosial secara aktual termasuk demokratisasi, terjadi dalam ruang *offline*. Dengan kata lain, keterikatan dalam ruang *online* perlu untuk diikuti dengan tindakan dalam wilayah *offline* (Nugroho, Putri, & Laksmi, 2012, hal. 87). Bagi aktivisme warga, menghubungkan dua ruang (*online* dan *offline*) menjadi pekerjaan yang menantang.

Tantangan lain dalam fenomena aktivisme daring dan konten politik saat ini adalah generasi kaum muda yang diposisikan sebagai target audiens sekaligus aktor yang berperan di dalamnya. Meski jika ditilik dari basis kelompok usia, remaja memiliki relasi yang kuat dengan internet, namun isu politik kerap kali dihindari oleh remaja dan kaum muda. Secara faktual, kedekatan relasi antara pengguna dan teknologi yang cenderung disebut sebagai *computer-mediated-communication*, dalam konteks remaja Indonesia menjadi hal yang lumrah. Secara umum, berdasarkan riset Tupot (2006), kita dapat menemukan kesamaan dalam budaya kaum muda di seluruh dunia, secara khusus pada informasi yang mendunia karena penyebaran teknologi seperti internet. Sebagai dampaknya, makin banyak mereka mengakses informasi yang serupa maka kaum muda makin tampak menjadi homogen.

Temuan juga menyatakan bahwa kaum muda di seluruh dunia masuk ke dalam proses “menjadi” dan terfasilitasi dengan menghubungkan teman melalui jejaring sosial untuk membuat mereka dekat dalam “menemukan” identitas mereka dengan bantuan teman (Stock, 2006, hal. 36). Fenomena tersebut juga memberikan tekanan bagi kita bahwa terhubung dengan media bersifat krusial bagi kaum muda dan ikatannya makin kuat

sejalan dengan fasilitasi melalui media komunikasi yang saat ini makin pervasif. Temuan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh penggagas aktivisme daring bertujuan kaum muda untuk dapat membangun pendekatan dalam menyampaikan isu politik. Dalam kajian ini, pendekatan yang dilakukan Pamflet sebagai aktivisme daring yang membawa isu hak asasi manusia signifikan untuk dianalisis secara mendalam.

METODE

Kajian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai basis metodologis dan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus oleh Suresh (2015, hal. 1) dinyatakan sebagai metode sekaligus sarana untuk suatu penelitian. Ia juga menyatakan bahwa metode studi kasus merupakan bentuk populer dari analisis kualitatif dan melibatkan observasi yang menyeluruh dari unit sosial, baik individu, keluarga, institusi, kelompok kultural, maupun komunitas. Dalam tulisan ini yang menjadi objek kajian adalah aktivisme daring yang dilakukan Pamflet.

Studi kasus juga dilihat sebagai strategi riset dalam ilmu sosial dan tiap strategi dapat digunakan untuk tiga tujuan, yakni eksploratoris, deskriptif, atau eksplanatoris (Yin, 2002, hal. 3). Tipe penelitian yang akan digunakan dalam riset ini bersifat deskriptif dengan fokus pada “how” dan “who”. Hal tersebut sesuai dengan riset ini yang berupaya memetakan, mendalami, dan menganalisis aktor dan upaya Pamflet dalam praktik aktivisme daring.

Pada dasarnya data dalam penelitian yang menggunakan metode studi kasus berasal dari enam sumber bukti, yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi-partisipan, dan perangkat fisik (Yin, 2002, hal. 86). Meskipun demikian, hanya sebagian dari teknik tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini

terkait relevansi serta acuan rumusan masalah.

Sumber data dokumentasi yang digunakan dalam kajian ini meliputi sejumlah artikel yang dipublikasikan oleh Pamflet, baik melalui situs *web* maupun media sosial daring yang dimiliki Pamflet. Selain itu juga didukung artikel di media massa dan media baru dengan konten aktivisme daring yang kontributif terkait riset. Sejumlah buku dan laporan penelitian terdahulu juga digunakan untuk kepentingan analisis data. Studi kepustakaan diaplikasikan untuk lebih memahami permasalahan yang diteliti dengan kepentingan data sekunder. Wawancara juga dilakukan pada tokoh terkait, utamanya aktor dalam Pamflet melalui surat elektronik untuk mengatasi kendala jarak dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pamflet: Praktik Gerakan Sosial dan Dunia Daring

Awalnya, temuan penulis akan Pamflet dimulai saat mencoba menganalisis mengenai gerakan kolektif di media baru yakni Dinamo (Digital Nation Movement) yang digagas oleh Usman Hamid (Parlina, 2013). Dinamo atau pergerakan bangsa digital merupakan forum bersama yang memiliki tujuan untuk mempertemukan sekaligus mengamplifikasi semangat perubahan dalam masyarakat. Gerakan ini digagas oleh Usman Hamid dan Arief Aziz dan diperkenalkan pada khalayak pada 19 Januari 2013 (Hamid, 2014, hal.3). Meski demikian, dalam perjalannya, penulis melihat adanya stagnansi dalam Dinamo dan menemukan sejumlah aktivisme lain yang masih eksis hingga saat ini, yakni Pamflet Indonesia. Pamflet Indonesia merupakan sebuah organisasi nirlaba yang dibentuk oleh anak muda, berfokus pada aksi pergerakan anak muda, serta mendorong munculnya inisiatif baru bagi perubahan di bidang sosial dan budaya (Pamflet, 2018).

Melalui wawancara yang difasilitasi dengan surat elektronik pada Muhammad Hisbullah Amrie, Youth Movement Coordinator Pamflet pada tanggal 13 September 2018, dijelaskan bahwa Pamflet berfokus pada pengembangan daya kritis anak muda untuk menganggapi isu hak asasi manusia sebagai bagian dari kampanye Pamflet untuk menumbuhkan semangat anak muda dalam mendukung gerakan hak asasi manusia secara luas, baik pengungkapan fakta pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, pemenuhan hak korban kekerasan sistemik, pemenuhan hak kelompok marjinal seperti kelompok disabilitas dan miboritas seksual maupun mendukung publikasi inisiatif anak muda di berbagai daerah di Indonesia. Berikut merupakan tampilan situs *web* Pamflet:

Gambar 1
Situs *web* Pamflet.or.id



Dalam situs *web* Pamflet, dapat dilihat karakteristik konten media yang sangat dekat dengan kaum muda melalui tampilan yang *pop* dan pilihan kata informal. Di dalam bagian divisi yang ditampilkan juga memuat tiga kategori utama, yakni Youth Activism, Youth Movement dan Youth Studies. Secara gamblang, Pamflet memberikan deskripsi terkait “Aktivisme di Sekitarmu” yang berisi tentang *insight* mengenai aksi sosial yang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk mengadakan perubahan atau mencapai tujuan tertentu (Pamflet, 2018). Dalam Youth Activism juga diberikan sejumlah *hint* yang dapat dilakukan kaum muda, yakni membuat film, membuat poster dan *meme*,

membuat lagu, *flash mob*, petisi daring, *blogging* dan teatrikal.

Pada bagian Youth Movement, Pamflet telah memiliki sejumlah data menarik mengenai direktori komunitas, *youth movement around the world*, dan *build yours*, yang berisi prinsip-prinsip yang wajib dimiliki oleh pihak yang ingin membangun sebuah gerakan (Pamflet, 2018). Pada bagian Youth Studies terdapat hasil penelitian, *newsletter*, dan kebijakan anak muda.

Selain itu, yang menjadi program utama dari Pamflet adalah isu hak asasi manusia yang tertuang dalam bagian “Human Rights 101” dan dideskripsikan sebagai *pilot project* yang dikerjakan Pamflet dengan dukungan Yayasan TIFA sebagai salah satu upaya memproduksi dan menyebarkan pengetahuan terkait hak asasi manusia kepada anak muda. Meski demikian, melalui wawancara pada Muhammad Hisbullah Amrie, tanggal 13 September 2018, Pamflet juga sedang mencoba merintis satu kanal pusat informasi seputar kesehatan reproduksi dan hak seksualitas dengan nama *infomuda.id* (*website*) dan *@infomuda* (Instagram).

Gambar 2
Laman situs *web* *infomuda.id*



Dalam situs *web* *infomuda* telah ada bagian “Tentang Kami” yang umumnya pada sebuah situs *web* berisi penjelasan penggagas situs. Namun, dalam *infomuda* ketika diakses Februari 2019 tidak menampilkan informasi apapun, sehingga dalam laman *web* hanya dapat dilihat kategori artikel, yakni Cerita Gema, Cerita Sesa, dan Cerita Pedro yang masing-masing menggambarkan perspektif anak muda, baik laki-laki dan perempuan tentang tubuh, relasi, dan juga ulasan dari media.

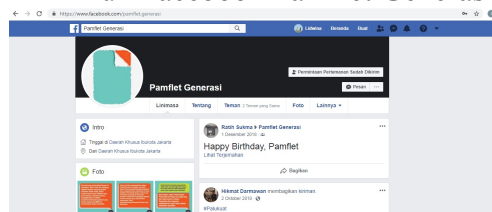
Dalam berkegiatan, Pamflet memanfaatkan media digital selain situs *web* yakni media sosial Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter seperti tergambar di bawah ini:

Gambar 3
Akun Instagram Pamflet
@Pamfletgenerasi



Sejumlah *highlights* muncul dari akun Instagram Pamflet, mulai dari isu Consent, *workshop*, Write4Rights, Banyak Tahu, Kesehatan, dan lain sebagainya. Akun yang tercatat Februari 2019 memiliki jumlah unggahan 509 ini memiliki 13,8k pengikut. Unggahan foto dan video Pamflet menjangkau *likes* dengan jumlah beragam. Meski demikian, secara *scanning*, peneliti melihat kecenderungan jumlah *likes* yang lebih rendah pada konten dengan topik “Ini Itu Demokrasi”, yakni 87 *likes* pada konten koalisi, 75 *likes* pada konten bijak memilih, dan 170 *likes* pada konten golput. Instagram Pamflet juga menghadirkan IG Story dan mengupayakan IG TV.

Gambar 4
Akun Facebook Pamflet Generasi



Akun Facebook Pamflet memiliki nama yang sama dengan akun Instagramnya. Sampai pada Bulan Februari 2019, Akun Facebook ini memiliki 337 teman dan karena penulis belum mendapatkan persetujuan pertemanan dari Pamflet, maka yang terlihat adalah unggahan

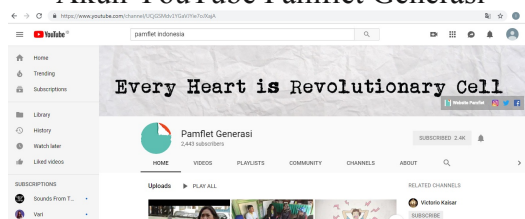
Pamflet tanggal 30 Oktober 2017 terkait *share* konten YouTube dengan judul HAM itu Kita. Jika dilihat dari unggahan foto Pamflet yang mampu dilihat penulis berisi tentang #CabutPerppuOrmas.

Gambar 5
Akun Twitter Pamflet @_pamflet



Secara kuantitas, sampai Bulan Februari 2019 ini, *tweets* Pamflet sebanyak 5,852 dengan jumlah *followers* 4,855 dan *following* 373 akun. Dalam deskripsinya, Pamflet menyatakan diri “membantu anak muda melakukan sesuatu bagi kemanusiaan”. Dalam akun Twitter, Pamflet telah membagikan 1,642 konten foto dan video, termasuk konten yang ada di Instagram, dibagikan pula konten yang sama dalam akun Twitter dan pada deskripsi konten selalu mengarahkan audiens untuk dapat melihat versi lengkap di situs *web* Pamflet.

Gambar 6
Akun YouTube Pamflet Generasi



Akun YouTube Pamflet ada sejak 4Februari 2013 dan bernama Pamflet Generasi dengan 2,433 *subscribers*. dalam kategori video, akun ini memiliki 65 video dengan konten yang sangat beragam bergantung pada isu dan kegiatan yang sedang Pamflet lakukan, mulai dari Dialog Muda, Festival, Seperlima,

Toleransi, Suka Ria Remaja, dan lain sebagainya. Dalam deskripsi tersaji informasi bahwa Perkumpulan Pamflet Generasi merupakan organisasi anak muda yang didirikan untuk mendorong dan memperkuat anak muda untuk berpartisipasi dalam proses gerakan sosial, dengan memberikan informasi dan pengetahuan tentang aktivisme dan hak asasi manusia.

2. Aktivisme Daring Kaum Muda dan Isu Politik

Pemaparan sejumlah akun media sosial yang digunakan Pamflet, terlihat upaya Pamflet untuk dapat merengkuh kaum muda. Secara faktual, aktivasi media digital yang dilakukan melalui sejumlah akun tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang Pamflet seperti yang disampaikan oleh Muhammad Hisbullah Amrie pada penulis pada tanggal 13 September 2018. Melalui media, Pamflet memiliki objektif mendorong anak muda kritis dan inisiatif demi perubahan yang berkeadilan dan berkesetaraan.

Pemanfaatan media dan teknologi tersebut sejalan dengan yang dinyatakan Ayres (1999) bahwa sarana *mobile* memudahkan komunikasi. Dalam konteks ini, Pamflet menyampaikan informasi kegiatan, konten bertema hak asasi manusia melalui situs *web*, akun Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Dalam konteks *cyberactivism* yang disampaikan Price (2000), Pamflet juga dapat menunjukkan sisi kecepatan *delivery* konten yang ingin disampaikan pada beragam isu HAM, salah satunya ketika merespon kasus Agni, Pamflet kemudian mengunggah konten satu hari setelah beragam media menyampaikan “hasil akhir damai” dalam kasus tersebut.

Aktivisme daring juga oleh Khamis & Vaughn (2011, hal. 5) dinyatakan sebagai penciptaan artefak digital secara intelektual dan emosional dengan sifat persuasif. Hal ini tentunya sejalan dengan visi Pamflet yang

tergambar melalui konten ajakan pada audiens, khususnya kaum muda untuk turut andil dalam memikirkan kepentingan bersamadan tidak terpaku pada kepentingan diri sendiri seperti pada konten YouTube edisi “HAM itu Kita: Bagaimana Cara Anak Muda Memperjuangkan HAM? (Episode 12).

Pamflet sebagai salah satu bentuk *cyberactivism* juga memenuhi apa yang disebut Milan (2012) sebagai pendukung pemberdayaan individu dan kolektif serta partisipasi melalui beragam kegiatan dan pelibatan kaum muda. Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam wawancara, Pamflet mengungkapkan bahwa kinerja Pamflet tak hanya dilakukan sendiri namun bekerjasama dengan pihak lain, seperti dinyatakan pada situs *webnya* yakni PublicVirtue, Komnas Perempuan, Watchdoc: Indonesia Documentary Channel, Serrum, Jakarta Biennale, Rumah Energi, Demos: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran, Yayasan Tifa, Transparency International, Hivos, Voice, Amnesty International, Unicef, serta Unesco. Dengan berbekal pada pengelolaan konten yang baik dalam laman situs *web* dan juga konten akun Instagram yang dimilikinya, Pamflet juga kerap kali dipercaya oleh aliansi lain untuk memberikan pelatihan seputar penulisan pop, aktivasi media sosial untuk kampanye, dan pembuatan strategi aktivasi untuk isu tertentu (isu kesehatan seksual, perempuan, dan lain sebagainya). Pamflet juga dipercayai untuk dapat memberikan desain dan sentuhan kreatif pada produk instansi lain seperti modul dan alat pelatihan.

Dengan jejaringnya yang luas, Pamflet juga menyatakan diri untuk sedapat mungkin merespon peristiwa tertentu yang terjadi di Indonesia ataupun luar negeri yang menjadi inspirasi bagi anak muda di Indonesia sebagai pembelajaran mereka dalam membangun gerakan, sebagai contoh isu pemanasan global yang videonya diunggah 21 Februari 2019 lalu.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Castells (2007, hal 249) bahwa gerakan sosial yang dilakukan Pamflet dimaknai sebagai tindakan kolektif yang bertujuan mengubah nilai dan kepentingan yang terinstitusionalisasi dalam masyarakat dalam masyarakat termasuk edukasi konsep seputaran demokrasi, kasus pernikahan anak, kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia dan bagaimana menyikapinya, termasuk bagaimana kultur Indonesia membentuk sikap patriarki dan cara yang bisa dilakukan kaum muda untuk menanganinya, salah satunya dengan pemahaman kesetaraan gender.

Edukasi tentang kesetaraan gender yang dilakukan Pamflet juga dapat dilihat sebagai bentuk *counter-power* seperti yang dinyatakan Castells (2007, hal.248) eksis sebagai resistansi atas dominasi *power* patriarki jika dalam konteks Indonesia. Beragam upaya untuk #menolaklupa pada kasus HAM juga menjadi upaya *counter-power* untuk mengusik penguasa atau pemerintah Indonesia agar tak melenyapkan isu jatuhnya korban pada kasus HAM.

Tantangan lain dalam *cyberactivism* merujuk pada problem relasi *offline* dan *online* seperti dinyatakan Nugroho, Putri, & Laksmi (2012, hal.87). Pamflet sendiri telah berupaya untuk melakukan keduanya. Hal yang dicermati Pamflet, seperti yang dinyatakan Muhammad Hisbullah Amrie pada tanggal 13 September 2018 antara lain kepercayaan media sosial sebagai sumber informasi oleh generasi Y dan Z sehingga Pamflet benar-benar berupaya maksimal untuk mengelola Instagram sebagai sarana edukasi. Meski demikian, Pamflet juga aktif menjalin kerjasama dengan sekolah secara luring untuk merengkuh audiens remaja.

Dari beragam kegiatan berikut konten yang dibuat oleh Pamflet, melalui pernyataan Amrie (2018), Pamflet juga dinyatakan mempelajari sejumlah konten yang tinggi atau rendah peminatnya. Isu yang tinggi peminatnya umumnya yang memancing kontroversi,

sedangkan isu tentang hak perempuan tak terlalu diminati. Meski demikian, dari hasil pengamatan penulis, isu terkait demokrasi juga kurang mendapat respon *likes* yang tinggi. Sedangkan isu kesehatan reproduksi juga dirasa Pamflet kurang mendapat peminat karena dirasakan bahwa kurang sesuai dengan *core issue* Pamflet yang awalnya mengawal isu-isu HAM. Untuk selanjutnya, isu terkait kesehatan reproduksi ada yang disampaikan melalui @infomuda.

Jika ditilik dari “kemasan” konten Pamflet, sejauh ini dikelola mengikuti perkembangan era terkini yang dekat dengan kaum muda, yakni memperbanyak konten berbentuk video viral yang memuat banyak informasi dalam satu menit video, dengan mengadaptasi taktik sejumlah kreator konten video seperti Vice, Broadly, Opini Id, Now This, Playground, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Praktik aktivisme daring yang dilakukan Pamflet memenuhi karakteristik konseptual aktivisme meliputi pemanfaatan teknologi dalam serangkaian kegiatan yang menengahkan isu publik. Pamflet juga diposisikan sebagai aktivisme yang membawa *counter power* melawan dominasi *power* dengan menengahkan isu HAM, kekerasan seksual, toleransi, dan beragam isu sensitif lainnya agar penguasa atau pemerintah memikirkan kondisi kaum marjinal ataupun pengusutan kasus yang sebelumnya tidak tuntas.

Pamflet memanfaatkan dan memaksimalkan media sosial daring dan media situs *web* untuk dapat menjangkau kaum muda melalui beragam taktik yang “ramah” dengan kaum muda berikut menjawab tantangan *cyberactivism* dengan mengintegrasikan praktik luring dan daring secara bersamaan untuk menguatkan *audience engagement* dan memperkuat posisi Pamflet dalam mengungkap

penguatan pemahaman kritis kaum muda akan isu di sekitarnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami tujukan pada pihak Pamflet Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan deskripsi kegiatan Pamflet yang mendukung terwujudnya tulisan ini. Terima kasih juga kami tujukan pada Departemen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM yang memfasilitasi tulisan ini.

REFERENSI

- Aelst, Peter Van danStefaanWalgrave. 2002. *New Media, New Movements? The Role of The Internet in Shaping the ‘Anti-Globalization’ Movement.* Information, Communication & Society.5:4 2002. 465-493
- Ambardi,Kuskridho, et. al. 2014. *Mapping Digital Media: Indonesia. A Report by The Open Society Foundations.* <http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-indonesia-20140326.pdf>
- Amrie, Muhammad Hisbullah. 2018. Wawancara.
- Ayres, Jeffrey M. 1999. *From the Streets to the Internet: The Cyber-Diffusion of Contention.* The Annals of The American Academy of Political and Social Science. Vol. 566 Issue 1, Page 132-143.
- Castells, Manuel. 2007. *Communication, Power, and Counter-Power in the Network Society.* International Journal of Communication 1 (2007), 238-266
- Clark, Eric. 2012. *Social Movement and Social Media: A Qualitative Study of Occupy Wall Street.* Research Report. Sodertorn University
- Freestone, O. & Mitchell, W. 2004. *Generation Y Attitudes towards E-Ethics and Internet-Related Misbehaviours.* Journal of

Business Ethics, Vol. 54, No. 2 (Oct., 2004), pp. 121-128

Hamid, Usman. 2014. *Digital Nation Movement*. Yogyakarta. Bentang Pustaka.

Milan, Stefania. 2012. *The Guardians of the Internet? Politics and Ethics of Cyberactivists (and of their Observers)*. Inter-Asia Roundtable 2012. Methodological and Conceptual Issues in Cyberactivism Research. 30-31 August 2012. Asia Research Institute, National University of Singapore.

Moghanizadeh, Somayeh. 2013. *The Role of Social Media in Iran's Green Movement*. Master of Communication Thesis. University of Gothenburg. Department of Applied Information Technology Gothenburg, Sweden. Report No. 2013:093. ISSN: 1651-476

Khamis, Sahardan Katherine Vaughn. 2011. *Cyberactivism in Egyptian Revolution: How civic Engagement and Citizen Journalism Tilted the Balance*. Issue 14 of Arab media and Society. Summer 2011

Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, dan Shita Laksmi. 2012. *Mapping the Landscape of The Media Industry in Contemporary Indonesia*. Report Series: Engaging media, empowering Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia through the Lens of Citizens' Rights.

Parlina, Ina. 2013. *Online Activists Gather For Change*. Diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2013/01/20/online-activists-gather-change.html>. Tanggal akses 3 September 2014.

Price, Tom. *Cyber Activism: Advocacy Groups and the Internet*. 2000. FPA. Foundation for Public Affairs. Washington DC.

Rudiantara. 2019. *Literasi Digital: The Age of Digital Literacy*. Disampaikan di Fisipol UGM, 23 Februari 2019.

Sandoval-Almazan, Rodrigo dan J. Ramon Gil-Garcia. 2014. *Towards cyberactivism 2.0? Understanding the use of Social Media and Other Information Technologies for Political Activism and Social Movements*. *Government Information Quarterly* 31 (2014) 365-378. Elsevier.

Sen, Krishna dan David T. Hill. (2000). *Media, Budaya, dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi

Stammers, Neil. 1999. *Social Movements and the Social Construction of Human Rights*. *Human Rights Quarterly* vol. 21 No. 4 (Nov 1999) pp. 980-1008

Suresh, D. (2015). *Case Study: Research Method for Social Sciences*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2684644>

Yang, Guobin. 2013. *The Power of The Internet in China: Citizen Activism Online*. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press.

Yin, R. K. (2002). *Case Study Research: Design and Methods* (3rd Ed.). Sage: California.

<https://pamflet.or.id/siapa-kami/>

<https://pamflet.or.id/youth-activism/>

<https://pamflet.or.id/youth-movement/>

<https://infomuda.id/>